



**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

# Bupati Persilakan Usut TPP Seluma

**SELUMA** - Bupati Seluma H. Bundra Jaya, SH, MH menegaskan permasalahan Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) untuk PNS Kabupaten Seluma tahun 2017, silakan diusut Kejati Bengkulu. Terutama terkait temuan Rp 12 miliar hasil audit BPK pada TPP tersebut.

"Silakan saja, toh anggaran TPP belum sempat dibagikan kepada PNS Seluma, anggaran tersebut masih tersimpan di kas daerah," ujar Bundra, kepada awak media kemarin (23/4).

Dikatakannya dana TPP belum dibagikan sehingga dugaan kerugian negara yang timbul sebesar Rp 12 miliar tersebut belum diketahui asal usulnya. Sehingga kewenangan penyidik Kejati lah mendalaminya. "Untuk TPP 2018 ditunda pembayarannya itu akibat dari protes sebagian besar PNS. Malah bisa saja kita batalkan pembayarannya kalau masih saja ribut," tegasnya.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Seluma, Irihadi, M. Si, kemarin kembali dilakukan pembahasan terkait besaran TPP yang akan dibayarkan. Pemkab Seluma juga akan melakukan rapat bersama TAPD hingga ditemukan besaran yang tepat dan sesuai. Jika keputusannya nanti sudah final maka akan diajukan kepada bupati untuk disetujui.

"Kita masih bahas terkait TPP ini. Tim saat ini masih melakukan rapat, membahas besaran TPP ini yang akan diberikan," demikian Irihadi.

Terkait pengusutan TPP Seluma, kemarin (23/4) sekitar pukul 11.00 WIB, delapan orang mengatasnamakan masyarakat Seluma mendatangi Kantor Kejati Bengkulu. Mereka menyatakan dukungannya atas langkah Kejati Bengkulu dalam penuntasan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pencairang TPP di Kabupaten Seluma tahun 2017.

Hal itu, Kajati Bengkulu Baginda Polin Lumban Gaol, SH, MH melalui Aspidus Henri Nainggolan, SH, MH sangat apresiatif. Ia mengatakan hingga saat ini pihaknya masih melakukan pengumpulan bahan keterangan dalam penyelidikan perkara TPP ini.

Kita sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum di Dirjen Keuangan dan Biro Hukum Kemendagri. Saat ini tim penyidik kita sudah di Jakarta untuk meminta petunjuk dari mereka guna melanjutkan penyelidikan yang saat ini tengah kita lakukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita sampaikan apa hasil dari koordinasi kita tersebut," terang Henri.

Saat ini ada keluhan dari pemerintah kabupaten (Pemkab) Seluma, lantaran sejak perkara ini disorot Kejati maka berdampak pada pencairan TPP 2018 yang hingga saat ini belum dicairkan, Henri mengatakan lebih baik TPP 2018 tidak disalurkan sebelum perkara ini tuntas.

"Ya bagus kalau untuk yang 2018 belum dicairkan. Karena memang perkara ini saat ini sedang rawan," pungkasnya. (sly/aba)